



IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus: Kelurahan Wijaya Pura Kota Jambi)

Destina Mae Tika

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: destinamaetika@gmail.com

Abd. Malik

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: abduljambi688@gmail.com

Nurlia Fusfita

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: nurliafusfita@uinjambi.ac.id

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jalan Lintas Jambi, Muara Bulian KM.16, Simpang Sungai Duren, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi,
36361 website : <https://febi.uinjambi.ac.id>

Corresponding author : destinamaetika@gmail.com

Abstract: *Implementation of the BPNT Program to improve people's welfare in an Islamic economic perspective, namely, distribution justice for fair distribution to all people who need it, halal food so that it conforms to halal principles and certification, management of riba-free transactions for program continuity, economic empowerment of recipients so that they are financially independent economy, and monitoring and accountability mechanisms in accordance with the principles of Islamic economics. The purpose of this research is to find, test, and develop insights regarding the implementation and effects of the BPNT Program in the Wijaya Pura Village, as well as to analyze the level of transparency of the program based on an Islamic economic perspective. The method used is descriptive qualitative. Techniques for checking the validity of data in qualitative research include credibility tests, transferability tests, dependability tests, and confirmability tests. The results of research on the BPNT Program in the Wijaya Pura Village are that this program has a positive impact on improving the welfare of the underprivileged through the distribution of food aid. Program implementation involves various stages, starting from the selection of beneficiaries to the direct distribution of funds.*

Keywords: *BPNT Program, Community Welfare, Islamic Economic Perspective*

Abstrak. Pelaksanaan Program BPNT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam yaitu, keadilan distribusi untuk distribusi yang adil kepada seluruh masyarakat yang memerlukan, kehalalan bahan pangan agar sesuai prinsip halal dan sertifikasi, pengelolaan transaksi bebas dari riba untuk kesinambungan program, pemberdayaan ekonomi penerima agar mandiri secara ekonomi, dan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang sesuai prinsip ekonomi Islam. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menemukan, menguji, dan mengembangkan wawasan terkait implementasi dan efek dari Program BPNT di Kelurahan Wijaya Pura, serta menganalisis tingkat transparansi program tersebut berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang sifatnya deskriptif. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif diantaranya yaitu uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas. Hasil penelitian mengenai Program BPNT di Kelurahan Wijaya Pura adalah bahwa program ini memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu melalui pendistribusian bantuan pangan. Implementasi program melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pemilihan penerima hingga pendistribusian dana secara langsung.

Kata kunci : Program BPNT, Kesejahteraan Masyarakat, Perspektif Ekonomi Islam

LATAR BELAKANG

Sebelum Program BPNT ada Program yang dinamakan RASTRA. Kemudian program RASTRA diganti ke Bantuan Pangan Non Tunai melalui mekanisme penyaluran yang diselenggarakan dengan jaringan sistem elektronik. Setiap bulannya KPM mendapatkan bantuan sebesar Rp.110.000 lewat kartu kombo/e-wallet. Bantuan itu tidak bisa dicairkan berupa fisik uang rupiah, namun bisa ditukar dengan bahan pangan Beras Dan Telur ke e-warung/agen yang telah dipilih. Pada tahun 2020, BPNT diubah menjadi Program Sembako. Dalam Program Sembako, bantuan dana yang diberikan tidak hanya dapat digunakan untuk membeli beras dan telur, tetapi juga untuk memperoleh sumber karbohidrat, protein, dan vitamin lainnya seperti jagung, daging ayam, daging sapi, kacang-kacangan, sayur, atau buah yang tersedia di pasar lokal. Kebijakan stimulus fiskal yang telah ditetapkan memberikan pemerintah alat baru untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi Covid-19 pada rumah tangga. Dengan memperluas kepesertaan Program Sembako, pemerintah berupaya untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi. Namun, agar program ini dapat berperan secara maksimal, beberapa perbaikan diperlukan berdasarkan pengalaman pelaksanaan BPNT sejak tahun 2017.

Tabel 1. 1
Perubahan Program Sembako (BPNT)/Kementerian Sosial Tahun 2022

No	Komponen	Sebelum	Setelah	Perubahan
1	Sasaran	15,2 Juta Keluarga	20 Juta Keluarga	Tambahan 4,8 Juta Klg
2	Nilai Manfaat	Rp 150.000/Bulan	Rp 200.000/Bulan	Tambahan Rp 50.000/Bulan
3	Alokasi Anggaran	Rp 27,4 Triliun	Rp 43,6 Triliun	Rp 15,5 Triliun

Sumber: Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial Tahun 2022

Untuk memaksimalkan peran Program Sembako selama pandemi Covid-19, pelaksana program perlu memastikan bahwa KPM dapat membeli kebutuhan pangan dengan harga yang sesuai dengan harga pasar. Dengan demikian, KPM dapat memperoleh jumlah pangan yang lebih banyak dibandingkan dengan saat pelaksanaan BPNT. Hal ini penting karena pandemi Covid-19 telah menyebabkan hilangnya pendapatan bagi sebagian penduduk. Sebagai respons terhadap wabah Covid-19 yang dimulai pada Maret 2020, manfaat dari program sembako yang sebelumnya sebesar Rp150.000/KPM/bulan, meningkat menjadi Rp200.000/KPM/bulan. Jumlah penerima manfaat juga dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta, dengan kenaikan sebesar 30 persen dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu, dan bantuan tersebut akan diberikan selama 9 bulan. Dengan adanya peningkatan manfaat ini, KPM memiliki kesempatan untuk memperoleh tambahan komoditas pangan yang dapat dikonsumsi. KPM yang telah memiliki KKS dapat langsung memanfaatkan bantuan yang diberikan. Selain itu, waktu pelaksanaan program telah ditetapkan sesuai dengan tanggal 10 setiap bulan, dan jenis pangan yang dapat dimanfaatkan oleh KPM juga semakin bervariasi. Saat ini, KPM tidak hanya menggunakan bantuan untuk membeli beras dan telur, tetapi juga untuk membeli daging ayam, ikan, sayur-mayur, dan buah. Untuk mengantisipasi penggunaan pangan segar, e-warung telah melakukan berbagai strategi, seperti menerima pesanan sebelum tanggal penyaluran dan membuat kesepakatan dengan KPM mengenai jenis bahan yang diinginkan untuk penyaluran berikutnya. Meskipun demikian, dalam beberapa wilayah pelaksanaan, masih ditemukan kasus di mana e-warung membuat paket bahan pangan dengan alasan kemudahan transaksi dan untuk memastikan semua bahan pangan, terutama yang segar, dapat habis tanpa memerlukan penyimpanan khusus. Pada tahun 2023 ini pencairan BPNT dikirim melalui ATM KKS, KPM (Keluarga Penerima Manfaat) baru mendapatkan jumlah tersebut, yang mencakup periode 2 bulan.

Tabel 1. 2
Data Penerima Program Bantuan Kemensos RI Se-indonesia Tahun 2022

Uraian	Jumlah
Program BPNT	1.200.000/KPM

Uraian	Jumlah
Program PKH	10.000.000/KPM
Program Iuran/KIS	96.800.000/Jiwa
Program Bansos Rastra	15.500.000/KPM

Sumber Data : <https://kemensos.go.id>

Tabel 1. 3

Data Penerima Bantuan Program BPNT Se-Kota Jambi Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah
Danau Teluk	1056/kpm
Pasar Jambi	595/kpm
Jelutung	2539/kpm
Kota Baru	3044/kpm
Jambi Selatan	2986/kpm
Telanaipura	2809/kpm
Paal Merah	1542/kpm
Pelayangan	1278/kpm
Alam Barajo	1.125/kpm
Jambi Timur	4.412/kpm
Danau Sipin	2.055/kpm
Total	23.441/kpm

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2022

Tabel 1. 4

Data Penerima Program Bantuan BPNT Kecamatan Jambi Selatan Tahun 2022

Kelurahan	Jumlah
Wijaya Pura	309/kpm
Pakuan Baru	236/pkm
Pasir Putih	362/kpm
Thehok	407/kpm
Tambak Sari	405/kpm
Eka Jaya	227/kpm
Lingkar Selatan	119/kpm
Talang Bakung	212/kpm
Paal Merah	700/kpm
Total	2977/kpm

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2022

Upaya pemerintah telah dilakukan mengentaskan kemiskinan, salah satunya dengan program BPNT. BPNT subsidi bantuan berupa beras dan sembako dikhususkan untuk rumah tangga yang memiliki penghasilan sedikit dalam rangka upaya pemerintah dalam menaikkan ketahanan pangan serta perlindungan sosial pencapaian indikator 6T, yang meliputi: tepat jumlah, tepat sasaran, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Proses pembagian BPNT dengan mengirimkan sejumlah saldo yang dibelanjakan di tempat e-warung yang sudah ditentukan. Program tersebut bertujuan meringankan beban pengeluaran RTS dari pemenuhan sebagian kebutuhan makanan utama yang berupa beras serta sembako serta menghalangi adanya pengurangan konsumsi energi dan protein. Disamping itu, BPNT memiliki tujuan menaikkan maupun membuka akses pangan keluarga penjualan sembako pada KPM berdasarkan jumlah yang sudah ditetapkan.

Tabel 1. 5

Data Penerima BPNT Di Kelurahan Wijaya Pura Tahun 2017-2022

Tahun	Kemiskinan	Penerima
2017	1331	157
2018	1437	235

2019	1479	291
2020	1512	345
2021	1643	400
2022	1700	423

Sumber : Data diolah oleh Kecamatan Jambi Selatan

Persoalannya yaitu bila praktik penyaluran BPNT di Kelurahan Wijaya Pura tidak sejalan terhadap aturan semestinya, sebab tidak tercapainya tujuan utama BPNT yang sudah dipaparkan di atas yakni dalam meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin dengan memenuhi sebagian kebutuhan makanan utama yang berupa beras, telur, tepung dan sebagainya. Alasan selanjutnya yakni tidak terselenggaranya distribusi BPNT dengan jumlah yang sudah ditetapkan pada Pedoman Umum BPNT yakni 15 Kg/RTS/bulan jadi semakin berkurangnya beras yang didapatkan masyarakat miskin serta artinya hak yang diterimanya pun ikut menurun.

Dalam implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi Islam, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Pertama, perlunya keadilan distribusi agar bantuan tersebut didistribusikan secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Kedua, pentingnya ketaatan terhadap prinsip kehalalan dalam pemilihan bahan pangan yang digunakan, agar tidak terjadi penggunaan bahan pangan yang tidak halal atau kurang memperhatikan sertifikasi halal. Ketiga, pengelolaan transaksi yang bebas dari riba untuk menjaga keberlangsungan program BPNT sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Keempat, perlunya pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima bantuan agar mereka dapat mandiri secara ekonomi dan tidak terus bergantung pada bantuan tersebut. Terakhir, diperlukan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif untuk memastikan implementasi program BPNT sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Implementasi

Pendapat dari Daniel A, Mazmaniandan Paul A, dan Sabatier, menguraikan arti implementasi ini dengan menyatakan bila, “Memahami apa yang sesungguhnya terjadi setelah sebuah program dikatakan berlaku atau dirumuskan adalah fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu peristiwa serta aktivitas yang muncul setelah diresmikannya pedoman-pedoman kebijakan yang meliputi baik usaha- usaha dalam mengadministrasikannya ataupun dalam memunculkan akibat/ dampak nyata untuk masyarakat maupun peristiwa-peristiwa.”

2. Konsep Implementasi

Implementasi dianggap sebagai bagian utama dari tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Melihat implementasi sebagai bagian penting dan utama dari tahap yang menjadi penentu dalam pengambilan kebijakan sementara itu untuk melihat dari sisi lainnya merupakan suatu fenomena yang kompleks yang bisa dipahami merupakan proses, suatu pemikiran atau output maupun sebagai suatu dampak yang artinya dalam konteks kebijakan suatu produk di implementasikan atau konseplisasi dalam proses rangkaian keputusan serta tindakan yang dikhususkan agar hasil keputusan yang sudah didapatkan, bisa diterima dengan baik oleh lembaga yang bersangkutan sehingga dapat terealisasi dengan baik dan implementasi juga dapat di definisikan dalam konteks luar, atau sedalam mana tujuan-tujuan yang direncanakan mendapat respon dan dukungan.

3. Tahap-Tahap Implementasi

Output-Output Kebijakan dari lembaga penyelenggara, ketaatan kelompok-kelompok target pada keputusan itu, Pengaruh nyata keputusan- keputusan lembaga penyelenggara, Asumsi pada pengaruh keputusan-keputusan tersebut., Evaluasi sistem politik pada UU, baik berbentuk evaluasi-evaluasi mendasar ataupun usaha dalam menjalankan perbaikan pada muatan/ isinya.

4. Program Bantuan untuk Masyarakat Miskin (BPNT)

BPNT adalah subsidi pangan berupa beras serta sembako yang diberikan untuk rumah tangga dengan penghasilan yang dikategorikan rendah dalam rangka pemerintah menaikkan ketahanan pangan serta melindungi secara sosial dalam rumah tangga target.

Kesuksesan Program BPNT dinilai dari tingkat pencapaian indikator 6T, antara lain: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi. Program ini memiliki tujuan dalam menurunkan biaya pengeluaran RTS dengan mencukupi beberapa kebutuhan makanan utama yang berupa beras serta menghalangi adanya pengurangan dalam konsumsi energi serta protein. Disamping itu, tujuan rasminya adalah menaikkan akses pangan keluarga lewat penjualan beras pada KPM berdasarkan total yang sudah ditetapkan.

Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas yang memadai dan ini dilakukan secara bertahap, bantuan pangan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai. Mulai tahun 2018, subsidi rastra juga dialihkan menjadi bantuan sosial yaitu bansos rastra dengan demikian Bantuan Sosial Pangan disalurkan ke masing-masing kabupaten/kota dalam bentuk non tunai atau natura yaitu tetap dalam bentuk beras.

5. Dasar-Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
4. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

6. Manfaat Bantuan Program BPNT

Sebagai upaya untuk ketahanan pangan di tingkat KPM meningkat dengan baik, sekaligus sebagai metode perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

7. Prinsip Pelaksanaan

Pelaksanaan BPNT harus memenuhi prinsip :

Memberikan suatu kuasa atau pilihan kepada penerima, untuk menentukan waktu pembelian, jumlah jenis, kualitas, harga bahan pangan (beras dan telur) dan lokasi e-warong. penerima tidak diarahkan pada e-warong tertentu dan e-warong tidak memaketkan bahan pangan yang menyebabkan penerima tidak mempunyai pilihan dan kendali terhadap jenis bahan pangan., E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan ketepatan harga. Kualitas jumlah, waktu, sasaran dan administrasi., Bank Penyalur dapat bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan pada KPM. Termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan. Mendorong usaha eceran rakyat untuk maju mendapatkan pelanggan dan meningkatkan penghasilan melalui KPM, Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM, Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan BPNT sesuai dengan buku pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku.

8. Penetapan Lokasi Dan Tahap Perluasan

Pada waktu melakukan perluasan Program BPNT berjalan di seluruh wilayah mencakup kabupaten/kota seluruh kecamatan baik desa maupun kelurahan dan pertengahan ini diatur dalam Surat Keputusan Dirjen PFM. Untuk beberapa daerah, dengan situasi dan kondisi terbatas aksesibilitas dan Infrastruktur nontunai akan diterapkan mekanisme yang berbeda dalam pelaksanaannya dan hal tersebut juga diatur melalui Surat Keputusan Dirjen PPM.

9. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat BPNT adalah keluarga dengan latar belakang kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, seterusnya ia disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, yang namanya termasuk dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) BPNT dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Unit penerima manfaat BPNT adalah keluarga, namun untuk kebutuhan penyaluran manfaat BPNT perlu ditentukan. Untuk 1 (satu) nama dalam KPM sebagai Pengurus KPM yang akan menjadi pemilik rekening BPNT.

Pengurus KPM ditentukan menurut urutan prioritas sebagai berikut:

- 1) Diutamakan atas nama perempuan di dalam keluarga, baik sebagai kepala keluarga atau sebagai pasangan kepala keluarga atau anggota umur 17 tahun keatas.
- 2) Jika KPM tidak memiliki anggota perempuan diatas 17 tahun, maka Pengurus KPM adalah laki-laki kepala keluarga, Jika laki-laki kepala keluarga tidak ada, maka dapat diajukan anggota keluarga laki-laki yang berumur di atas 17 tahun dan memiliki dokumen identitas kependudukan sebagai Pengurus KPM.
- 3) Jika laki-laki kepala keluarga tidak ada, maka dapat diajukan anggota keluarga laki-laki yang berumur di atas 17 tahun dan memiliki dokumen identitas kependudukan sebagai Pengurus KPM, Bagi KPM yang merupakan penerima PKH, maka yang dimaksud sebagai Pengurus.

10. Besaran Manfaat

Besaran manfaat BPNT adalah 110.000/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan bisa ditukarkan, dengan beras dan/atau telur sesuai kebutuhan KPM di e-Warong. Pemilihan komoditas beras dan telur dalam Program BPNT berdasarkan tujuan-tujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM.

11. Mekanisme Pelaksanaan

1. Persiapan

Persiapan bagian dari tahap awal kegiatan BPNT setelah Kementerian Sosial menentukan petugas wilayah dan tahapan pelaksanaan serta Bank Penyalur. Aktivitas ini dapat meliputi komunikasi koordinasi pelaksanaan. Penyiapan Data KPM. Pembukaan Rekening Kolektif dan Persiapan e-Warong.

2. Koordinasi Pelaksanaan

Koordinasi di Tingkat Pemerintah Pusat, Tingkat Pemerintah Provinsi dan Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota.

12. Persiapan e-Warong

Setelah mengetahui jumlah KPM di tempat masing-masing dari desa/kelurahan dari Kementerian Sosial, Bank Penyalur dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Tenaga Pelaksana BPNT di daerah mengidentifikasi agen-agen bank atau pedagang untuk dapat menjadi e-warong penyalur BPNT.

13. Edukasi Dan Sosialisasi

Membagikan pemahaman untuk para pemilik kepentingan di pusat dan daerah tentang kebijakan, tujuan dan mekanisme program BPNT.

14. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan perasaan tentram seseorang akibat tercukupinya kebutuhan hidup lahiriah maupun batiniah, kesejahteraan muncul berdasarkan dari standar internasional berkaitan dengan kesehatan, pakaian, makanan dan tempat tinggal, sementara kesejahteraan batin berkaitan dengan persepsi yang sifatnya intelektual, emosional ataupun spiritual seseorang. Kesejahteraan bukanlah alat perjuangan namun sebagai tujuan perjuangan.

15. Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam

a) Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Al- Falah secara bahasa mempunyai makna “Zhafarah bima yurid” (kemenangan atas apa yang dikehendaki), dikatakan “al-falah” memiliki arti menang, keberuntungan serta memperoleh kenikmatan akhirat. Menurut definisi liberal, falah merupakan kemuliaan serta kemenangan, yakni kemuliaan dan kemenangan didalam hidup.

b) Konsep Distribusi

Distribusi merupakan alokasi pengiriman barang-barang pada orang banyak maupun ke sejumlah lokasi. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa dimengerti bila distribusi adalah sebuah aktivitas didalam ekonomi serta harus memperoleh perhatian serius. Akan tetapi, pemahaman seperti itu tidak sama jika dipandang berdasarkan ekonomi Kapitalisme, yaitu faktor distribusi tidak menjadi sebuah faktor yang menyebabkan munculnya persoalan ekonomi di masyarakat, akan tetapi faktor produksi, seperti yang dipaparkan: pokok persoalan ekonomi berada dalam produksi. Sehingga, para ekonom kapitalis memiliki pendapat bila penyebab kemiskinan (ketidakcukupan) yaitu kekurangan maupun langka maupun terbatas (limited) dalam suatu barang serta jasa yang ada, dalam mencukupi kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya (unlimited) serta beragam. Dalam menangani permasalahan itu, manusia harus bekerja keras melakukan produksi sebanyak mungkin alat pemuas kebutuhannya tersebut.

Ditinjau pada perspektif ekonomi Islam, opini tersebut sangatlah salah. Berdasarkan sistem ekonomi Islam, pokok permasalahan ekonomi tidak berada pada kurangnya produksi, akan tetapi dalam persoalan penyaluran. Seperti yang dipaparkan oleh al-Maliki: “permasalahan ekonomi tidak berada pada kurangnya SDA (resources) yang ada, sebab SDA cukup disediakan oleh Allah SWT” (QS. Hud [11]: 6), namun berada dalam cara menyalurkan sumber daya itu pada semua manusia. Berapa banyaknya barang dan jasa yang ada, dengan tidak adanya pola distribusi yang sesuai, erta pembatasan konsumsi, pasti akan selalu muncul persoalan kekurangan untuk yang lainnya²². sehingga sangatlah luas arti dari distribusi pada ekonomi Islam, yakni meliputi pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi serta sumber-sumber kekayaan. Dimana, Islam membolehkan kepemilikan umum serta kepemilikan khusus, serta memposisikan masing-masingnya kaidah-kaidah dalam memperoleh memanfaatkannya, kaidah-kaidah dalam warisan, hibah serta wasiat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan dan metode yang digunakan adalah kualitatif yang sifatnya deskriptif.

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian dilaksanakan untuk menganalisis “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam” adapun yang menjadi objek variabel X (variabel independent) atau variabel bebas adalah Implementasi Program. Masalah penelitian yang merupakan variabel terikat (dependent) adalah kesejahteraan masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.

Jenis dan Sumber Data

Data Primer merupakan data yang didapatkan peneliti langsung dari sumber data aslinya. Data primer yang dipakai yakni interview, observasi, serta dokumentasi. Obyek penelitiannya yaitu Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jambi Selatan.

Data Sekunder data yang didapatkan dari sumber internal maupun eksternal. Penelitian ini, data sekundernya dari dokumen, buku-buku, laporan penelitian serta dokumen lain yang menjadi data penunjang penelitian ini yang diperoleh dari BPS serta kantor Kecamatan Jambi Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendistribusian Program BPNT untuk menaikkan kesejahteraan di Kelurahan Wijaya Pura

Pendistribusian Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Kelurahan Wijaya Pura bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendistribusian bantuan ini melibatkan beberapa tahapan yang dimulai dari pemilihan penerima bantuan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh pak Rinno selaku Kabid Bpnt Dinas Sosial Kota Jambi saat wawancara bahwasanya :

“Melihat dari data dulu yang masuk dalam DTKS itu harus karena itu wajib karena kalau tidak terdaftar dalam DTKS mereka tidak dapat bantuan nanti setelah itu di verifikasi TKSK dinas sosial di kecamatan yang turun langsung ke lapangan kalo di kecamatan jambi selatan khususnya wijaya pura biasanya buk aci salah satu yang memverifikasinya bersama tim kelurahan juga untuk mengecek layak atau tidak menjadi daftar penerima.”

Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam pengolahan data dan penyaluran bantuan secara langsung melalui kantor pos. Hal ini seperti yang disampaikan oleh pak Rinno selaku Kabid Bpnt Dinas Sosial Kota Jambi saat wawancara bahwasanya :

“data dari pemerintah pusat di proses dulu ke pemerintah pusat dan bantuan tersebut diberikan langsung melalui di kantor pos tidak melalui kita fasilitator kami baik kelurahan tidak tahu, paling mereka pendampingan untuk pencairan untuk 2023 ini, kalau untuk tahun sebelumnya pencairannya di e-warong lagi lagi ini kebijakan dari kemensos dan ternyata 2023 ini bantuan tersebut di tunaikan di kantor pos biasanya cair 2 bulan sekali”

Koordinator BPNT, Pak Rinno, berperan dalam mengatasi kendala dan konflik yang mungkin terjadi di lapangan. Beliau juga bertanggung jawab dalam melakukan konsultasi dengan Badan Keuangan Daerah untuk menjamin keuangan yang transparan dan akuntabel.

“sebagai pemerintah daerah cuma penerima kita tidak bisa menentukan evaluasi yang bisa menentukan evaluasi kan pemerintah pusat kita hanya sebagai fasilitator di daerah kita tidak bisa menentukan ini baik atau tidak paling kami bisanya kalau memang mereka tidak layak kita usulkan apakah ini masih layak untuk dapat atau tidak begitupun sebaliknya nanti biasanya kita melakukan muskel dari muskel itu kita mengumpulkan semua pihak jadi bukan keputusan dari 1 pihak ada perangkat RT ada lembaga adat ada perangkat lurah ada babinsa jadi semua berembuk memutuskan layak atau tidak seseorang mendapatkan bantuan kalau tidak layak ya kita tentukan dengan keputusan bersama.”

Evaluasi dilakukan secara periodik oleh inspektorat dan hasilnya diumumkan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan pemerintah pusat.

“Kita sesuai peraturan berlaku kalo masalah keuangan kita konsultasi kepada Badan Keuangan Daerah kota jambi nanti tetap apa yang kita lakukan kita pertanggungjawab nanti ada evaluasinya didalam internal ada yang namanya inspektorat nanti inspektorat review nanti hasilnya diumumkan kalau ada kegagalan kalau masih bisa diperbaiki kita perbaiki sebelum sampai ke institusi yang lebih tinggi lagi seperti BPK jadi insyaAllah sebelum kita periksa dengan yang lebih tinggi lagi kita sudah di evaluasi oleh inspektorat jadi semua transparan baik ke pemerintah pusat maupun masyarakat. Karena semua ada datanya dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan.”

Pendistribusian BPNT di Kelurahan Wijaya Pura didasarkan pada usulan dari RT sebagai penguasa wilayah yang mengetahui kondisi masyarakat setempat.

“Semuanya berawal dari RT karena RT kan penguasa wilayah dan dia tahu kondisi masyarakat mereka, dari RT diajukanlah nama nama calon penerima ke dinas sosial nanti dinas sosial memverifikasi dan memvalidasi nah itu tugasnya TKSK nah mereka yang akan melihat apakah layak atau tidak kalau layak kita ajukan ke pemerintah pusat melalui kemensos. Nanti kementerian sosial itulah yang menentukan kapan mereka dapat dan kapan mereka tidak dapat lagi Jadi saya hanya menyetujui apa yang disampaikan oleh TKSK kecamatan karena kan mereka yang turun ke lapangan dan mereka punya dokumentasinya dari situ kita bisa melihat apa kerjaannya keadaan warganya bagaimana. Tapi kadang muncul juga pertanyaan "rumah bagus belum tentu keadaan hidup kami bagus." Kalo seperti ini kami memaklumi dan memahami karena ada mereka yang dapat rumah karena tumpangan ada juga rumah bagus karena warisan itu tetap kami ajukan tapi bukan berarti begitu di usulkan langsung dapat karena seluruh indonesia nih banyak bukan kota jambi aja kecuali kalo keputusannya ada di dinas sosial mungkin mereka

langsung dapat, tapi inikan tidak. Kami juga ada mendata ulang tapi lagi lagi keputusan di pemerintah pusat kadang yang kehidupannya sudah layak kami usulkan untuk tidak dapat lagi ternyata keputusan di pemerintah pusat mereka tetap dapat itu sering terjadi.”

Pemerintah daerah juga menyediakan bantuan lain, seperti CSR dan bantuan hari raya, untuk masyarakat yang kurang mampu. Program-program ini juga dijalankan dengan transparan dan melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk perangkat RT, lembaga adat, perangkat kelurahan, dan Babinsa. Tujuan utamanya adalah untuk meringankan beban masyarakat yang memang membutuhkan.

“Pemerintah Daerah tiap tahun itu mengelontorkan CSR atau bantuan lainnya kadang kadang diberikan sebelum hari raya idul fitri untuk meringankan masyarakat kita yang memang kurang mampu kan kasian di hari raya yang lain bersuka cita mereka gak mampu biasanya tiap tahun pak walikota memberi bantuan seperti beras, minyak, kadang juga dari yang bukan pemerintah juga kaya PT.Sinar Sentosa itu dikumpulkan orang orang yang kurang mampu lalu kami bagikan ke mereka tapi ini kami prioritaskan yang tidak mendapatkan program BPNT kecuali kalo Pak RT nya curi curi ya karena kalau itu kami tidak bisa mendeteksinya karena itu wewenang RT dan masyarakat setempat karena banyak menerima keluhan katanya RT itu gak adil orang yang pro atau disenangi saja yang diberikan. Kadang RT menilai seseorang itu kurang sosialisasi dengan masyarakat setempat jadi nggak dikasih bantuan padahal orang gak mampu kadang para RT itu kurang peka. Karena dinas sosial hanya ngerangkum data dari kecamatan yang didapatkan oleh kelurahan dari RT sudah terima bulat kami hanya memverifikasi data tersebut.”

Pak Rinno juga menyebutkan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah berkisar Rp. 200.00. Hal ini merupakan kebijakan dari pemerintah juga yang cukup membantu para masyarakat yang kurang mampu.

“program bpnt ini meringankan karena perbulan 200.000 kenapa pengambilnya ibu ibu bukan bapak bapak karena untuk rumahtangga karena kalo bapak bapak nanri dibelikan untuk rokok, tapi kalau untuk ibu ibu bisa dibelikannya ke beras atau kebutuhan lainnya yang keperluan dapur memang secara signifikan tidak terlalu membantu tapi itulah hadirnya pemerintah membantu masyarakat apalagi masyarakat kita ini terlalu banyak berapa persen masyarakat indonesia ini yang ada di garis kemiskinan karena data kemiskinan itu bisa berubah ubah contoh tahun ini bisa orang itu gak miskin tahun depan bisa aja mereka miskin begitu juga sebaliknya. Contoh lagi tahun ini hidup seseorang itu mewah eh bulan depan dia dapat musibah rumahnya kebakaran jadi orang miskin nah yang kaya gini juga kadang perlu dibantu tergantung situasinya.”

Meskipun ada kendala dalam implementasi program, seperti kesulitan menjangkau orang yang seharusnya layak menerima bantuan dan potensi kesalahan dalam proses pemilihan penerima, pemerintah daerah selalu berusaha untuk memaksimalkan manfaat bantuan dengan berbagai evaluasi dan musyawarah. Program ini merupakan upaya konkret dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim, yang menjadi target dari pemerintah pusat untuk tahun 2024.

2. Implementasi Program BPNT Di Kelurahan Wijaya Pura

a. Penerima Bantuan

Implementasi Program BPNT di Kelurahan Wijaya Pura telah memberikan bantuan kepada beberapa warga yang memenuhi syarat. Hasil wawancara dengan warga yang menerima bantuan, seperti Marlina, Parsiah, Bania, dan Rohana, menunjukkan beberapa aspek mengenai pengalaman mereka dalam menerima dan memanfaatkan bantuan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Marlina, ia mendapatkan bantuan setelah mengajukan persyaratan ke Dinsos, dan meskipun prosesnya memakan waktu, dia bersyukur atas bantuan tersebut yang cukup membantu mengurangi beban keluarganya, terutama saat suami tidak mendapatkan pendapatan yang mencukupi. Proses pendistribusian telah

mengalami perubahan dari pemberian beras secara fisik menjadi penyaluran uang yang lebih mudah diakses.

“Saya mendapatkan karena daftar ke dinsos mengajukan syarat syaratnya kesana 1 tahun kemudian saya baru dapat bantuan tersebut. Bantuan ini Alhamdulillah cukup membantu apalagi disaat kerjaan bapaknya kurang mendukung gaji yang diterima juga sedikit. Saya berharap petugas pemerintahan selalu turum kelapangan ngedata ulang biar gak kejadian ada orang yang sudah kaya malah dapat orang yang susah malah nggak dapat kan kasian.”

Parsiah juga menyampaikan bahwa bantuan BPNT telah membantu mengurangi beban keluarganya dalam membeli beras, sehingga bisa memanfaatkan uang yang tersedia untuk kebutuhan lain. Ia merasa tidak ada kendala dalam mengakses bantuan dan menganggap distribusinya telah adil dan transparan.

“Saya dapat setelah tahun 2005 saya pindah kesini disaat itu kehidupan kami lagi susah bapaknya cuma tukang ojek harus menghidupi 2 anak sekolah dan saya sebagai buru cuci dirumah orang. Terus Pak RT nya minta KK dan KTP saya untuk didaftarkan. Sejak saat itu saya mendapat bantuan dari pemerintah dari mulai dulu dapat beras kurang bagus sampai sekarang bantuan itu diganti uang. Alhamdulillah membantu saya tahu setiap keluarga mempunyai beban yang beda beda jadi lepas salah satu beban keluarga kami untuk beli beras. Sebelum dapat bantuan suka sedih kalo bapaknya nggak kerja mau beli beras dulu gaji saya belum segitu. Sejauh ini saya belum menemukan ada petugas yang sosialisasi tentang bantuan ini. Nggak tahu juga ya kalau tempat lain karna saya kan banyak menghabiskan waktu dikerjaan.”

Bania menyatakan bahwa bantuan BPNT sangat membantu dirinya, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena gaji suaminya yang terbatas. Ia berharap agar petugas pemerintah lebih aktif turun ke lapangan dan melakukan sosialisasi agar warga yang berhak mendapatkan bantuan bisa didata dengan tepat.

“Saya dapatnya karena dari RT yang lama saat itu kehidupan saya dan keluarga jauh dari kata mampu. Jadi saya ikut juga saat itu daftar untuk mendapatkan bantuan karena suami saya cuma kerja bangunan nggak cukup untuk menghidupi anak 6. Alhamdulillah nya dapat jadi saya bersyukur. Sudah cukup adil kalau saya menilainya karena semua yang diberikan sudah sama seperti kelurahan lain. Saya sadar bahwa bpnt di peruntukkan untuk orang orang yang kurang mampu dan saya bisa pastikan saya berhak mendapatkannya. Semoga di pemerintahan berikutnya bantuan yang didapat bisa lebih banyak lagi. Karena uang 200ribu kadang belum cukup.”

Umi Sumiati menyampaikan bahwa bantuan BPNT sangat membantu untuk keperluan rumah tangga sehari-hari. Ibu Umi juga menyampaikan bahwa bantuan BPNT juga mudah dalam penerimaannya sekarang.

“Pertamanya hidup susah, untuk makan irit jadi buruh cuci saat itu minta tolong sama pak RT saat itu pak ambiar jadi ditolongi beliau dapatlah raskin karena susah sekali hidup suami masih nganggur maklum dulu belum tahu seluk beluk jambi jadi aku mulai kerja ikhtiar kalo ada bantuan minta gitu. Aku dapat mulai dari tahun 2000 sudah berpuluh puluh tahun. Karena saat itu mikir kemana lagi cari bantuan kalo ngutang harus ngebayar. Sekarang mengaksesnya lebih mudah karna sekarang beli sendiri di transfer ngambilnya di agen link kalo dulu ambilnya di warung namanya e-warung. Sekarang keluarnya kadang sebulan sekali kadang dua bulan sekali ndak tentu,tapi dengan dapat Rp.200.000 perbulan bisa dibeliin tidak hanya beras bisa beli yang lain juga walaupun sedikit dikit tapi lengkap. tidak pernah nemui kendala kalau sekarang lancar lancar saja beda dengan dulu kadang dipotong beras dengan oknum. Semuanya transparan sih menurut saya karena kan sekarang di transfer dari pusat jadi mekanismenya pun tidak ribet”

Rohana menyampaikan bahwa bantuan BPNT sangat membantu keluarganya yang membutuhkan, meskipun suatu saat bantuan sempat terhenti. Namun, dengan adanya bantuan tersebut, ia merasa cukup terbantu dan bersyukur mendapatkannya.

“Saya dapat awalnya pada tahun 2000 kalau tidak salah, rame rame sama beberapa tetangga sini karena saat itu ditawari sama pak RT “ana mau tidak beras raskin?” Ya saya jawab mau tapi dikatakan pak RT tapi berasnya jelek. Tapi gapapa pak saya mau beras raskin, Dulu susah hidup anak 5 butuh sekolah dan saat itu gaji bapaknya belum bisa mencukupi hidup. Sempat juga terhenti bantuan ini lalu berapa bulan kemudian kembali lagi. Transparan tu transparan kan berasnya dibagiin orang dapat sekian ya saya juga segitu nggak ada juga kami dimintai duit. Harapan saya semoga pemerintah terus meningkatkan kualitas kualitas sembako yang dikasih.”

Secara keseluruhan, implementasi Program BPNT di Kelurahan Wijaya Pura terlihat memberikan manfaat nyata bagi penerima bantuan. Proses distribusi yang awalnya berupa beras secara fisik telah berkembang menjadi penyaluran uang secara elektronik, yang memudahkan akses bagi warga.

b. Tidak Menerima Bantuan

Hasil wawancara dengan warga yang tidak menerima bantuan Program BPNT di Kelurahan Wijaya Pura, beberapa hal menjadi sorotan. Pertama, warga seperti Melly menyadari bahwa bantuan tersebut ditujukan untuk orang yang membutuhkan, dan karena mereka merasa gaji dan kondisi keuangan sudah cukup, mereka memilih untuk tidak mendaftar untuk mendapatkan bantuan tersebut.

“Tahu sebatas bantuan tidak mampu untuk orang yang membutuhkan. Karena kerjaan saya dan suami sepertinya sudah cukup untuk memenuhi jadi tidak perlu kami mendaftar. Sudah sesuai dengan prosedur karena beberapa keluarga dan tetangga kami sudah dapat ya tidak tahu kalo yang lain. Bantuannya ditambah saja jangan 200.000 itu saran saya.”

Kemudian, Tarmi merasa heran karena meskipun ia telah mendaftar beberapa kali, namun belum pernah mendapatkan bantuan. Ia merasa prosesnya panjang dan tidak tahu pasti mengapa ia belum mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan perasaan kurang adil dalam pendistribusian bantuan.

“Tahu karena pernah daftar ini tuh kan bantuan untuk orang orang miskin yang hidupnya kurang. Tapi sekarang banyak orang mengaku miskin demi untuk dapat bantuan. Saya tidak tahu kenapa saya tidak dapat, dulu memang saya tidak daftar karena sibuk kerja dan gak ada orang yang ngasih tahu saya tentang bantuan itu apalagi saya menghidupi anak 3 tanpa suami dan terpaksa anak yang saya yang besar putus sekolah dulu. Beberapa tahun yang lalu saya juga daftar supaya dapat bantuan 3 kali tapi sampai sekarang belum cair kata mereka petugas dinas sosial prosesnya panjang tergantung pemerintah pusat lagi. Kalau dibilang sulit tidak sulit sulit banget tapi kadang suka sedih karna tidak dapat bantuan listrik pun tidak bisa di subsidi jadi kadang bayar listrik dulu sisanya baru beli kebutuhan beras dan yang lain. Karna takut listrik diputusi. Saran saya semua di data ulang pilih yang benar benar berhak untuk mendapatkannya”

Lidiawati juga merasa kurang paham mengenai proses pendaftaran dan pendistribusian bantuan BPNT. Ia merasa RT di lingkungannya kurang responsif dalam memberikan informasi, dan melihat bahwa beberapa orang yang dianggap sudah mampu sudah lama mendapatkan bantuan, sedangkan warga seperti dia yang membutuhkan belum mendapatkannya.

“Saya kurang paham juga disini RT nya kurang responsif kalau ditanya dijawab daftar sendiri aja ke dinas sosial jika dilihat yang dapat bantuan orang orang yang sudah lama sekali yang dirasa sekarang sudah mampu, ketika saya tanya ke dinas sosial berkasnya sudah diajukan ke provinsi tergantung lagi nanti provinsi ngajuin ke pusat jika cair ya keluar. Belum sesuai karena orang orang kecil seperti kami saja belum dapat. Sulit, kadang beras 20kg tidak cukup untuk 1 bulan anak 4 lagi masa masa pertumbuhan makannya tidak sedikit kadang usaha bapaknya lagi sepi tidak menentu. Inginnya pemerintah bisa mendata ulang karena pasti tiap tahunnya berbeda. Pernah, tapi tidak

sering kadang dapat bantuan beras dari pemerintah kota atau ada yayasan yayasan gitu yang kasih bantuan tapi tidak sering paling baru 3 kali.”

Selanjutnya, Kuntati yang merupakan janda dengan usaha warung kecil merasa bahwa bantuan tersebut belum menyeluruh dalam mencakup semua orang yang berhak menerima. Ia menyampaikan saran agar program ini didata ulang agar bantuan bisa tepat sasaran dan ditambah jika memungkinkan.

“Tahu bantuan untuk orang tidak mampu dari sejak dulu bantuan itu sudah ada kan kakak ipar saya dapat juga soalnya. Sudah berjalan dengan baik sepertinya tapi hanya saja belum menyeluruh. Tidak terlalu tapi kalau dapat bantuan saya bisa fokus pengobatan orangtua saya yang sudah sepuh apalagi saya janda. Sarannya didata ulang agar tahu siapa yang berhak mendapatkan dan tidak dan kalau bisa bantuannya ditambahi. Ada saya pernah 2 kali dapat bantuan dari yayasan yang bukan dari dinas sosial.”

Terakhir, Lia Endahsari yang memiliki gaji cukup tinggi juga tidak mendaftar untuk menerima bantuan BPNT karena merasa bahwa mereka tidak berhak atas bantuan tersebut karena kondisi keuangan keluarganya sudah mencukupi.

“Tahu itu bantuan dari pemerintah bantuan yang dikhususkan untuk orang tidak mampu, karena saya tidak berhak untuk dapatkan itu karena Tuhan sudah ngasih saya dan suami rezeki lebih dari cukup. Implementasinya sudah bagus saya lihat karena sekarang bukan beras lagi tapi uang jadi bisa digunakan lebih maksimal. Tapi mungkin belum menyeluruh. Memberikan kontribusi pasti iya untuk masyarakat yang membutuhkan ada yang menyeluruh ada juga yang tidak tergantung kebutuhan setiap keluarga. Sarannya coba orang-orang pemerintahan turun ke lapangan cek lagiarganya kadang rumah bagus belum tentu kehidupannya bagus.”

Secara keseluruhan, wawancara dengan warga yang tidak menerima bantuan BPNT menunjukkan bahwa prosesnya belum menyeluruh dan kurang adil dalam pendistribusiannya, sementara yang lain merasa puas dengan keadaan keuangan mereka dan tidak merasa berhak untuk menerima bantuan.

3. Transparansi Program BPNT Di Kelurahan Wijaya Pura Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif ekonomi Islam, transparansi dalam implementasi Program BPNT di Kelurahan Wijaya Pura sangat penting. Transparansi memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah tepat sasaran dan mencapai keluarga yang benar-benar membutuhkan. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa beberapa warga yang menerima bantuan menganggap proses distribusi telah berjalan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan keadilan distribusi dan mengurangi kesenjangan sosial.

Perspektif ekonomi Islam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan adalah tugas dan tanggung jawab yang diakui sebagai amal ibadah. Namun, transparansi dalam program bantuan ini juga penting untuk memastikan dana yang dialokasikan oleh pemerintah benar-benar dikelola dengan baik dan digunakan untuk tujuan yang tepat. Transparansi juga berperan dalam meminimalisir risiko korupsi dan penyalahgunaan dana. Dengan mekanisme yang transparan, masyarakat dapat melihat bagaimana dana bantuan digunakan dan memastikan bahwa bantuan tersebut mencapai sasaran dengan tepat. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan dan pemerintah.

Meskipun Program BPNT di Kelurahan Wijaya Pura telah dijalankan dengan transparansi dalam proses pemilihan penerima dan distribusi bantuan, masih ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti kesulitan menjangkau keluarga yang seharusnya berhak menerima bantuan dan potensi kesalahan dalam pemilihan penerima. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan evaluasi dan musyawarah untuk memaksimalkan manfaat bantuan dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan yang lebih luas.

Pada pandangan ekonomi Islam, penting untuk menjaga keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Program BPNT merupakan salah satu upaya konkret dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim dan memberikan bantuan

kepada mereka yang membutuhkan. Namun, perlu dipastikan bahwa program ini terus dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, bantuan sosial tersebut akan memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan di Kelurahan Wijaya Pura.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pendistribusian Program BPNT untuk menaikkan kesejahteraan di Kelurahan Wijaya Pura

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan inisiatif pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Di Kelurahan Wijaya Pura, program ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pemilihan penerima bantuan hingga pendistribusian dana secara langsung. Hasil penelitian dan wawancara dengan berbagai pihak mengungkap sejumlah temuan dan refleksi penting terkait implementasi, dampak, serta kendala yang dihadapi dalam program ini.

Program BPNT di Kelurahan Wijaya Pura dimulai dengan pemilihan penerima bantuan berdasarkan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang dikelola oleh pemerintah pusat. Penerima bantuan kemudian diverifikasi oleh TKSK (Tim Koordinasi dan Supervisi Keluarga) di kecamatan, dengan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kelayakan penerima. Setelah diverifikasi, bantuan disalurkan melalui kantor pos secara langsung kepada penerima.

Program ini melibatkan peran penting dari Koordinator BPNT, yang tidak hanya bertanggung jawab untuk mengatasi kendala di lapangan tetapi juga melakukan konsultasi dengan Badan Keuangan Daerah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Pada upaya menjaga transparansi dan pertanggungjawaban, program ini menjalankan evaluasi periodik oleh inspektorat dan hasilnya diumumkan secara terbuka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan dikelola sesuai dengan peraturan dan masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas tentang penggunaan dana.

Program BPNT telah memberikan dampak positif bagi sebagian besar penerima bantuan di Kelurahan Wijaya Pura. Warga yang menerima bantuan merasakan bantuan tersebut membantu meringankan beban kebutuhan sehari-hari, terutama dalam hal membeli beras dan memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya. Bantuan ini memberikan peluang bagi mereka untuk memprioritaskan kebutuhan lain dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, ada juga beberapa tanggapan yang menyoroti beberapa kendala dan permasalahan dalam program ini:

1. Kesulitan Menjangkau Penerima yang Layak: Beberapa warga mengungkapkan bahwa ada kesulitan dalam menjangkau orang yang seharusnya layak menerima bantuan. Proses verifikasi dan seleksi penerima mungkin perlu ditingkatkan agar lebih akurat dalam memastikan bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
2. Kesalahan dalam Proses Pendaftaran: Ada juga pengalaman warga yang merasa bingung atau merasa proses pendaftaran dan seleksi tidak transparan. Beberapa warga merasa bahwa ada penerima bantuan yang seharusnya tidak memenuhi syarat tetapi tetap mendapatkan bantuan.
3. Ketidaksetaraan dalam Pendistribusian: Terdapat tanggapan dari warga yang merasa bahwa beberapa yang menerima bantuan sebenarnya tidak memenuhi kriteria, sementara yang membutuhkan masih belum mendapatkannya. Ketidaksetaraan dalam pendistribusian dapat memunculkan perasaan ketidakpuasan dan merongrong tujuan program.
4. Saran untuk Perbaikan dan Peningkatan: Beberapa warga memberikan saran untuk melakukan pembaruan dan peningkatan dalam program BPNT. Ada dorongan untuk lebih aktifnya petugas pemerintah dalam memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program ini, serta melakukan evaluasi mendalam mengenai kriteria dan mekanisme pendistribusian.

Program BPNT di Kelurahan Wijaya Pura telah memberikan dampak positif bagi sebagian besar penerima bantuan dalam hal meringankan beban kebutuhan pangan. Namun, masih ada

sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi program ini, termasuk dalam proses pemilihan penerima, transparansi, dan ketidaksetaraan pendistribusian. Upaya untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan program, termasuk melalui sosialisasi yang lebih baik, evaluasi yang cermat, dan peningkatan mekanisme pendistribusian, akan menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih luas dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Wijaya Pura.

2. Implementasi Program BPNT Di Kelurahan Wijaya Pura

Program BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) diimplementasikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan. Prosesnya dimulai dari pendataan dan verifikasi di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) oleh pemerintah pusat, kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh instansi daerah. Penerima bantuan adalah mereka yang terdaftar dalam DTKS dan dianggap layak berdasarkan verifikasi lapangan oleh TKSK (Tim Koordinasi dan Supervisi Keluarga).

Koordinator BPNT berperan penting dalam mengatasi kendala dan konflik yang mungkin terjadi di lapangan. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Petugas daerah termasuk RT (Rukun Tetangga) dan TKSK di kecamatan memiliki peran dalam melakukan verifikasi dan validasi penerima bantuan, serta mengumpulkan data dari masyarakat setempat.

Awalnya, bantuan BPNT diberikan dalam bentuk beras secara fisik, namun seiring waktu, mekanisme distribusi berubah menjadi penyaluran uang secara elektronik. Hal ini bertujuan untuk memudahkan akses bagi warga penerima bantuan. Selain BPNT, pemerintah daerah juga memberikan bantuan lain seperti CSR (Corporate Social Responsibility) dan bantuan hari raya kepada masyarakat yang membutuhkan. Program-program ini juga dijalankan dengan transparan dan melibatkan partisipasi dari berbagai pihak.

Meskipun program BPNT memiliki manfaat yang nyata, terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Beberapa warga yang memenuhi kriteria merasa kesulitan mendapatkan bantuan atau belum mendapatkannya. Ada keluhan tentang proses yang panjang, informasi yang kurang jelas, serta penilaian subyektif oleh petugas lapangan. Program BPNT secara periodik dievaluasi oleh instansi terkait, seperti inspektorat, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan akuntabilitas terhadap masyarakat dan pemerintah pusat. Terdapat usulan untuk melakukan evaluasi dan pengumpulan data ulang guna memastikan bantuan tepat sasaran dan memaksimalkan manfaatnya.

Wawancara dengan penerima bantuan menunjukkan bahwa bantuan BPNT memiliki dampak positif dalam membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun jumlahnya relatif kecil, bantuan tersebut membantu meringankan beban keluarga, terutama bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Pendapat dari non-penerima bantuan juga mencerminkan berbagai pandangan. Ada yang merasa tidak perlu mendaftar karena kondisi keuangan sudah cukup, sementara yang lain merasa kurang puas dengan proses pendistribusian dan merasa tidak mendapat bantuan meskipun memenuhi kriteria.

Warga penerima bantuan dan non-penerima bantuan memiliki beberapa saran dan harapan terkait program BPNT. Beberapa usulan mencakup peningkatan sosialisasi, perbaikan proses verifikasi dan validasi, serta evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bantuan yang tepat sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program BPNT di Kelurahan Wijaya Pura memberikan manfaat bagi sebagian besar penerima bantuan dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam implementasi, upaya transparansi, evaluasi, dan perbaikan terus dilakukan untuk memaksimalkan manfaat program ini.

3. Transparansi Program BPNT Di Kelurahan Wijaya Pura Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Keadilan dan Kemanfaatan menjadi prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah keadilan dan kemanfaatan. Program BPNT telah memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang sesuai dengan nilai-nilai ini. Namun, untuk mencapai keadilan yang lebih

luas, penting untuk terus memastikan bahwa proses pemilihan penerima dan distribusi bantuan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini akan memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada yang membutuhkan tanpa adanya penyalahgunaan atau ketidakadilan.

Transparansi dalam Proses implementasi Program BPNT di Kelurahan Wijaya Pura telah berusaha untuk menjalankan prinsip transparansi dengan mengikutsertakan perangkat RT, lembaga adat, perangkat kelurahan, dan Babinsa dalam proses pendistribusian. Namun, wawancara juga menunjukkan bahwa masih ada beberapa warga yang merasa tidak paham mengenai proses pendaftaran dan pendistribusian. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat mengenai program ini, sehingga semua yang berhak menerima bantuan dapat tercakup dengan baik.

Evaluasi dan Musyawarah yang dijelaskan oleh Koordinator BPNT penting dalam memastikan bahwa keputusan mengenai penerimaan bantuan dilakukan dengan bijaksana dan berdasarkan kesepakatan bersama. Namun, wawancara juga mengungkapkan adanya beberapa kendala dalam proses pemilihan penerima, seperti perasaan bahwa beberapa orang yang sebenarnya tidak membutuhkan sudah mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan dengan tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi terkini masyarakat.

Pengentasan Kemiskinan program BPNT merupakan langkah konkret dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrim. Dari sudut pandang ekonomi Islam, membantu mereka yang membutuhkan adalah ibadah, dan bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat implementasi program ini dengan transparansi, evaluasi berkala, dan partisipasi masyarakat.

Partisipasi Masyarakat dalam ekonomi Islam, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dianggap penting. Program BPNT di Kelurahan Wijaya Pura telah mencoba melibatkan berbagai pihak, seperti RT, lembaga adat, dan perangkat kelurahan, dalam proses pemilihan penerima. Namun, dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa suara semua warga didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan terkait bantuan ini.

Keterbukaan dan Pertanggungjawaban penting dalam ekonomi Islam. Program BPNT telah mengupayakan keterbukaan dalam proses distribusi dan penggunaan dana bantuan. Evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat juga merupakan langkah positif dalam memastikan akuntabilitas terhadap pemerintah pusat dan masyarakat. Namun, perlu terus ditingkatkan agar laporan hasil evaluasi dapat diakses oleh masyarakat secara lebih mudah.

Secara keseluruhan, implementasi Program BPNT di Kelurahan Wijaya Pura telah mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan, kemanfaatan, dan keterbukaan. Namun, masih ada beberapa aspek yang dapat diperbaiki untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan menguatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan evaluasi berkala, diharapkan program ini dapat terus memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Seperti yang diungkapkan oleh al-Maliki, permasalahan ekonomi tidak berasal dari kurangnya sumber daya alam (SDA) yang tersedia, karena SDA telah cukup disediakan oleh Allah SWT (QS. Hud [11]: 6). Namun, inti persoalan ekonomi terletak pada cara distribusi sumber daya tersebut kepada seluruh manusia. Jumlah barang dan jasa yang ada mungkin cukup, tetapi tanpa pola distribusi yang tepat dan tanpa pembatasan konsumsi yang sesuai, masalah kekurangan akan selalu muncul bagi orang lain. Oleh karena itu, konsep distribusi dalam ekonomi Islam mencakup lebih dari sekadar pengaturan pemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Islam mengizinkan baik kepemilikan umum maupun kepemilikan pribadi, dan menempatkan prinsip-prinsip kaidah dalam cara memperoleh dan memanfaatkannya. Selain itu, prinsip-prinsip ini juga berlaku dalam konteks warisan, hibah, dan

wasiat, yang membentuk kerangka kerja yang luas untuk distribusi yang adil dan berkeadilan dalam ekonomi Islam.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

“Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya.350) Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauhulmahfuz). Hūd [11]:6.”

Dan tidak satu pun makhluk bergerak dan bernyawa, yang melata, merayap atau berjalan di muka bumi ini melainkan semuanya telah dijamin Allah rezekinya. Semua makhluk itu diberi naluri dan kemampuan untuk mencari rezeki sesuai dengan fitrah kejadiannya. Dia mengetahui tempat kediamannya ketika hidup di dunia dan mengetahui pula tempat penyimpanannya setelah mati. Semua itu sudah tertulis dan diatur serapi-rapinya dalam Kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz, perihal perencanaan dan pelaksanaan dari seluruh ciptaan Allah secara menyeluruh dan sempurna.

Tafsir Tahlili

Binatang-binatang yang melata, yang hidup di bumi yang meliputi binatang yang merayap, merangkak, atau pun yang berjalan dengan kedua kakinya, semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Binatang-binatang itu diberi naluri dan kemampuan untuk mencari rezekinya sesuai dengan fitrah kejadiannya, semuanya diatur Allah dengan hikmat dan kebijaksanaan-Nya sehingga selalu ada keserasian. Jika tidak diatur demikian, mungkin pada suatu saat ada binatang yang berkembang-biak terlalu cepat, sehingga mengancam kelangsungan hidup binatang-binatang yang lain, atau ada yang mati terlalu banyak, sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan. Jika ada sebagian binatang memangsa binatang lainnya, hal itu adalah dalam rangka keseimbangan alam, sehingga kehidupan yang harmonis selalu dapat dipertahankan.

Allah mengetahui tempat berdiam binatang-binatang itu dan tempat persembunyiannya, bahkan ketika masih berada dalam perut induknya. Pada kedua tempat itu, Allah senantiasa menjamin rezekinya dan semua itu telah tercatat dan diatur serapi-rapinya di Lauh Mahfuz, yang berisi semua perencanaan dan pelaksanaan dari seluruh ciptaan Allah secara menyeluruh dan sempurna.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Persepsi Muzakki Dalam Membayar Zakat Fitrah di LAZ BMH Kota Jambi

Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa hampir rata-rata muzakki yang peneliti wawancarai pemahaman mereka mengenai LAZ BMH masih sangatlah kurang meskipun rata-rata informan menganggap baik adanya lembaga amal zakat ini. Menurut pengamatan peneliti, hal ini dikarenakan sosialisasi yang diberikan oleh LAZ BMH Kota Jambi masih tergolong pasif. Adapun alasan para muzakki membayar zakat fitrah di LAZ BMH Kota Jambi ini cukup beragam yaitu seperti ada yang membayar zakat fitrah di LAZ BMH Kota Jambi karena memang mendapatkan sosialisasi dari LAZ BMH Kota Jambi pada saat mengikuti pengajian Majelis Ta'lim, adanya ajakan dari saudaranya yang kebetulan bekerja di LAZ BMH Kota Jambi, dan ada pula yang membayar zakat fitrah disana karena mendapat sedikit informasi dari pihak LAZ BMH Kota Jambi yang kebetulan sedang bertugas mengumpulkan kotak amal. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara mengenai pengelolaan zakat fitrah di LAZ BMH Kota Jambi kepada para muzakki, dan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata muzakki meyakini bahwa pengelolaan zakat fitrah di LAZ BMH Kota Jambi dilakukan dengan benar sesuai dengan aturan dan berharap zakat tersebut sampai kepada mustahik sesuai sasaran.

Besarnya harapan dan kepercayaan muzakki yang diberikan kepada LAZ BMH Kota Jambi menjadi amanah yang harus di jaga. Islam dengan tegas melarang seseorang untuk mengingkari amanah yang diberikan sebagai mana yang dijelaskan di dalam Hadist Riwayat Ahmad yang artinya:

Dari Anas bin Malik berkata: *Nabiyullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah berkhotbah di hadapan kami kecuali beliau mengatakan: "Tidak sempurna keimanan bagi*

orang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji."

Hadist di atas menjelaskan bahwa tidaklah sempurna iman seseorang apabila tidak amanah. Artinya bahwa amanah yang diberikan oleh seseorang wajib untuk di jaga baik itu kecil ataupun besar amanah yang diberikan. Menjadi lembaga yang mengurus zakat tentu memiliki amanah yang sangat besar.

Dibalik besarnya harapan muzakki terhadap pengelolaan zakat di LAZ BMH Kota Jambi, juga terdapat muzakki yang merasa tidak puas setelah membayar zakat fitrah di LAZ BMH Kota Jambi dikarenakan tidak dapat melihat secara langsung bagaimana zakat fitrah tersebut disalurkan sebagaimana yang biasa muzakki tersebut lihat ketika membayar zakat fitrah secara langsung kepada musahik. Tidak dapat di pungkiri bahwa muzakki akan merasa puas dan merasa tercapai tujuannya apabila pengelolaan zakat fitrah yang dibayarkannya jelas. Sikap ini tentu sangat manusiawi, dimana hasil kerja keras yang di peroleh dan niat yang tulus ingin memberikan sesuatu kepada orang lain maka akan ada kepuasan tersendiri yang dirasakan meskipun sebenarnya dalam ajaran islam tidak dapat dibenarkan.

Selain itu, Zakat juga bukan untuk pemenuhan kebutuhan kepuasan atau hubungan kepada sesama manusia saja, ingin diakui atau dilihat masyarakat sebagai orang yang peduli. Namun lebih dari itu, zakat adalah untuk membersihkan harta dari yang haram dan menyucikan jiwa dari sifat kikir, rakus, dan sombong.

Dari penjelasan yang peneliti uraikan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa persepsi muzakki dalam membayar zakat fitrah di LAZ BMH Kota Jambi termasuk dalam persepsi positif. Persepsi positif merupakan persepsi yang menggambarkan semua informasi dan tanggapan yang dilewatkan untuk mengeksploitasinya. Tindakan berikut, yaitu. menerima dan mendukung objek yang diamati. Meskipun tergolong dalam persepsi positif, namun terdapat beberapa catatan yang menjadi pembenahan penting bagi pihak LAZ BMH Kota Jambi dalam meningkatkan pelayanan terhadap muzakki yang membayar zakat fitrah di Lembaga tersebut.

2. Upaya LAZ BMH Kota Jambi Untuk Meningkatkan Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Fitrah di LAZ BMH Kota Jambi

Minat adalah perhatian, kesukaan, keinginan atau kecenderungan hati terhadap sesuatu. Menurut Bimo Walgito dikutip oleh Ramayulis dalam metodologi pengajaran agama islam mengatakan bahwa minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai dengan keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membutuhkan lebih lanjut. Dalam menumbuhkan suatu minat tentu dibutuhkan upaya-upaya agar minat tersebut muncul.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan minat muzakki dalam membayar zakat fitrah di LAZ BMH Kota Jambi, pihak LAZ BMH Kota Jambi telah melakukan berbagai macam upaya, diantaranya yaitu:

a) Melakukan Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat

Sosialisasi adalah suatu usaha untuk memberikan informasi tentang suatu kabar atau berita. Terjadinya sosialisasi membuat tersebarnya suatu informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat banyak dan terjadinya informasi membuat terjalinnya hubungan antara penyampaian pesan dan penerima pesan. Sosialisasi program adalah proses mengkomunikasikan program-program perusahaan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pengenalan dan penghayatan dalam lingkungan tertentu.

Mengingat minimnya pengetahuan masyarakat Kota Jambi mengenai LAZ BMH Kota Jambi. Pihak LAZ BMH Kota Jambi melakukan upaya berupa sosialisasi melalui pengajian majelis ta'lim, ceramah agama di masjid-masjid dan melakukan sosialisasi melalui silaturahmi kerumah masyarakat secara door to door. Tidak hanya itu adanya upaya sosialisasi ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat fitrah.

b) Melakukan sosialisasi melalui media sosial

Media sosial saat ini telah menjadi Trend dalam komunikasi pemasaran. Media sosial merupakan sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Jejaring sosial merupakan bentuk media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat diseluruh dunia. Contohnya seperti Instagram, Facebook, Whatsapp, dan Tiktok.

Untuk dapat menjangkau muzakki yang lebih luas, disini LAZ BMH melakukan upaya dengan cara melakukan sosialisasi melalui media sosial. Adapun bentuk sosialisasi di media sosial ini yaitu berupa postingan tentang ajakan untuk membayar zakat serta informasi mengenai kewajiban membayar zakat. Adapun media sosial yang digunakan oleh LAZ BMH Kota Jambi yaitu Instagram dan Facebook.

c) Melakukan kerjasama dengan yayasan yang ada di Kota Jambi

Kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang di tunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.

Untuk meningkatkan jumlah muzakki yang membayar zakat fitrah di LAZ BMH Kota Jambi, pihak LAZ BMH Kota Jambi melakukan mitra atau kerjasama dengan beberapa yayasan yang ada di Kota Jambi seperti, Panti Asuhan, Rumah Tahfidz dan Pesantren. Menurut pihak LAZ BMH, upaya ini tergolong efektif dikarenakan dengan adanya kerjasama ini jumlah muzakki yang membayar zakat fitrah di LAZ BMH Kota Jambi cukup meningkat.

d) Meningkatkan kualitas pelayanan

Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata mereka terima dengan pelayanan yang mereka harapkan atau inginkan dari suatu perusahaan.

Peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh LAZ BMH Kota Jambi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan muzakki dalam membayar zakat fitrah melalui LAZ BMH Kota Jambi. Adapun kualitas pelayanan yang dilakukan yaitu berupa adanya karyawan yang baik, mampu berkomunikasi dengan baik, serta mampu memberikan kepercayaan terhadap penggunaan pelayanan. Diharapkan semakin baiknya kualitas pelayanan maka para muzakki yang membayar zakat fitrah di Lembaga tersebut akan merasa puas sehingga akan tetap konsisten untuk membayar zakat fitrah di LAZ BMH ini kembali.

Dalam melaksanakan upaya meningkatkan minat muzakki untuk membayar zakat fitrah di LAZ BMH Kota Jambi terdapat beberapa faktor yang mendukung salah satunya seperti banyaknya rumah tahfidz, pesantren dan panti asuhan di Kota Jambi sehingga memberikan peluang besar bagi LAZ BMH Kota Jambi untuk menjalin mitra kerja sama dalam penghimpunan zakat fitrah, kemudian faktor pendukung lainnya yaitu adanya kemajuan teknologi informasi seperti media sosial yang memudahkan LAZ BMH Kota Jambi dalam mensosialisasikan tentang kewajiban zakat fitrah. Namun, dalam upaya ini juga terdapat faktor yang menghambat LAZ BMH Kota Jambi dalam meningkatkan minat muzakki untuk membayar zakat fitrah yaitu yang pertama masih minimnya pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat fitrah dan yang kedua yaitu adanya isu miring yang beredar dimasyarakat tentang pengelolaan zakat di lembaga amal zakat sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih membayar zakat fitrah secara langsung kepada para msutahik.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Program BPNT di Kelurahan Wijaya Pura yaitu:

1. Program ini memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu melalui pendistribusian bantuan pangan. Implementasi program melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pemilihan penerima hingga pendistribusian

dana secara langsung. Program ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga yang membutuhkan dengan mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, kemanfaatan, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

2. Program ini memberikan manfaat, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti kesulitan menjangkau penerima yang layak, kesalahan dalam proses pendaftaran, ketidaksetaraan dalam pendistribusian, dan perlunya peningkatan dalam proses verifikasi dan validasi. Upaya transparansi dan evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih luas.
3. Pada perspektif ekonomi Islam, program ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, partisipasi masyarakat, dan keterbukaan, namun masih diperlukan perbaikan dalam beberapa aspek untuk memastikan kesuksesan program dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman tentang distribusi sumber daya dalam ekonomi Islam juga dijelaskan, di mana pentingnya pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan untuk mencapai tujuan distribusi yang adil.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Aisyah Nurul Dewi, Nurcahyono Herbasuki, Santoso Slamet. "Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang," 2013.
- [2] Aspar, Sakaruddin, Syakhrudin DN. "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar" Volume 1, Nomor 2 (2020).
- [3] Djaenal, R., J. E. Kaawoan, & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- [4] Erdita, Rodiah, Stella, Isnaini. "Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin (RASKIN) Di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan" 2, No 1. (March 2014).
- [5] Fanny, N. R. F., & Megawati, S. (2022). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. *Publika*, 407–418. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p407-418>
- [6] Gideon Kongginawan, Burhanuddin Kiyai, JEORI M.Ruru. "Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kelurahan Suwung Bandar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sainghe." *Universitas Sam Ratulangi*, 2016.
- [7] Hasimi, D. M. (2020). Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 1(01), 61–72. <https://doi.org/10.24042/revenue.v1i01.5762>
- [8] Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019*, 2019.